

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat modern pada era digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, beragama, berpolitik, dan membangun identitas sosial¹. Jika pada masa sebelumnya ruang publik lebih banyak dibentuk melalui pertemuan langsung, organisasi sosial, lembaga keagamaan, media cetak, dan forum politik formal, maka pada era digital ruang publik telah bergeser ke media sosial dan berbagai platform komunikasi daring. Perubahan ini membuat informasi, gagasan, opini, bahkan konflik sosial-politik dapat menyebar secara sangat cepat². Di satu sisi, era digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperluas pengetahuan, memperkuat partisipasi demokratis, dan menyuarakan aspirasi kelompok yang selama ini kurang terdengar. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan persoalan serius, terutama ketika identitas agama, etnis, budaya, dan pilihan politik digunakan sebagai alat untuk membangun sekat sosial, memperkuat prasangka, serta menciptakan polarisasi di tengah masyarakat³.

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki tantangan yang lebih kompleks dalam menghadapi perubahan tersebut. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari keberagaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan pandangan politik. Keberagaman ini pada dasarnya merupakan kekayaan

¹ Ardiansyah, Muhamad Alfian. "Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid terhadap Demokratisasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4, no. 6 (2025): 512–522. doi:10.55681/seikat.v4i6.1838.

² Asripa, Devy Habibi Muhammad, and Ari Susandi. "Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2021): 75–90. doi:10.36835/falasifa.v12i02.555.

³ Auliani, Siti Nurhamidah, Afifah Nur Zakiah, Filjah Hasyati, Muhammad Nathan, and Abdul Fadhil. "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Moderasi Beragama: Relevansinya dalam Menghadapi Radikalisme di Indonesia." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 188–205. doi:10.61132/akhlak.v2i1.328.

bangsa yang telah menjadi dasar terbentuknya identitas nasional Indonesia⁴. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dibangun bukan atas dasar keseragaman, melainkan atas kesadaran untuk hidup bersama di tengah perbedaan. Akan tetapi, keberagaman juga dapat berubah menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola dengan nilai toleransi, keadilan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta kesediaan untuk menerima kelompok lain sebagai bagian sah dari kehidupan bersama. Oleh karena itu, pluralisme menjadi konsep penting dalam menjaga keutuhan masyarakat Indonesia⁵.

Pluralisme tidak hanya dapat dipahami sebagai fakta adanya perbedaan, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk menerima, menghargai, dan merawat keberagaman. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, pluralisme menjadi dasar penting bagi kehidupan demokrasi karena demokrasi tidak mungkin tumbuh sehat apabila masyarakat saling menolak hanya karena perbedaan agama, etnis, atau identitas kelompok⁶. Demokrasi membutuhkan ruang dialog, kesetaraan warga negara, serta penghormatan terhadap hak kelompok mayoritas maupun minoritas. Namun, kenyataan politik Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme sering berhadapan dengan politik identitas. Politik identitas muncul ketika agama, etnis, ras, budaya, atau kelompok tertentu dijadikan dasar untuk memperoleh dukungan politik, membangun loyalitas massa, dan membedakan diri dari kelompok lain⁷.

Politik identitas pada satu sisi dapat dipahami sebagai upaya kelompok tertentu untuk memperoleh pengakuan dan keadilan sosial. Dalam konteks

⁴ Azmi, Muhyidin. "Interpretasi Nurcholish Madjid atas Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Pluralisme Agama." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 5, no. 2 (2023): 101–112. doi:10.20871/tjsq.v5i2.232.

⁵ Basri, Junaidin, Syakira Ainun Nisa Basri, and Irma Indriyani. "Risiko Politik Identitas terhadap Pluralisme di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 1027–1036. doi:10.35931/aq.v16i3.991.

⁶ Dias, Hasan Purnomo, Julhadi, and Ahmad Hanafi. "Gagasan Moderasi Beragama: Menguk Pluralisme dalam Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid." *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2024): 156–172. doi:10.38073/aljadwa.v3i2.1537.

⁷ Dian, I. Masripah, D. Purwandani, D. N. M. Maliki, and F. A. Pane. "Nurcholish Madjid's Perspective about Thought of Religious Pluralism." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 139–148. doi:10.31538/munaddhomah.v3i2.242.

kelompok yang terpinggirkan, politik identitas dapat menjadi sarana perjuangan hak. Akan tetapi, politik identitas menjadi berbahaya apabila digunakan secara eksklusif, manipulatif, dan diskriminatif⁸. Dalam bentuk seperti ini, politik identitas tidak lagi bertujuan memperjuangkan keadilan, tetapi digunakan untuk membangun sentimen “kami” melawan “mereka”. Akibatnya, masyarakat mudah terbelah berdasarkan simbol agama, etnis, dan afiliasi politik tertentu. Penelitian Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, dan Irma Indriyani pada tahun 2022 menunjukkan bahwa politik identitas yang berkembang secara negatif dapat mengakibatkan lunturnya pluralisme, hilangnya toleransi, munculnya kekerasan fisik maupun nonfisik, bahkan berpotensi mendorong disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa⁹.

Fenomena politik identitas juga terlihat dalam sejumlah kasus dan kajian terbaru. Artikel KPU Kabupaten Nduga tahun 2025 menjelaskan bahwa politik identitas muncul ketika agama, suku, ras, atau golongan dijadikan alat untuk menarik dukungan politik. Dalam batas tertentu, politik identitas dapat dipahami sebagai bagian dari keberagaman masyarakat. Namun, apabila digunakan secara berlebihan dan eksklusif, politik identitas dapat menimbulkan perpecahan sosial serta konflik horizontal¹⁰. Sejalan dengan hal tersebut, artikel KPU Kabupaten Tolikara tahun 2025 menegaskan bahwa politik identitas dapat menurunkan kualitas demokrasi karena pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan kesamaan identitas, bukan berdasarkan kapasitas, program kerja, atau gagasan yang ditawarkan. Akibatnya, demokrasi berpotensi bergeser dari ruang kompetisi gagasan menjadi arena pertarungan sentimen “kami” melawan “mereka”. Kondisi ini juga dapat memperkuat praktik politik transaksional dan mengancam integrasi

⁸ Harsono, Harun. “Politik Identitas dan Partisipasi Politik di Media Sosial: Analisis Model Struktural pada Generasi Z di Kota Malang.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 166–187. doi:10.46874/tkp.v4i2.752.

⁹ Basri, Junaidin, Syakira Ainun Nisa Basri, and Irma Indriyani. “Risiko Politik Identitas terhadap Pluralisme di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 1027–1036. doi:10.35931/aq.v16i3.991.

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga. “Politik Identitas, Ketika Perbedaan Jadi Alat Kepentingan.” October 22, 2025. https://kab-nduga.kpu.go.id/blog/read/8110_politik-identitas-ketika-perbedaan-jadi-alat-kepentingan.

nasional¹¹. Meskipun demikian, temuan dalam Indonesian Journal of Law and Justice tahun 2025 menunjukkan bahwa pengaruh politik identitas tidak selalu bersifat mutlak. Dalam konteks Pemilu 2024, penggunaan branding Islam dalam kampanye memang dapat meningkatkan elektabilitas kandidat di kalangan mahasiswa, tetapi sebagian mahasiswa tetap mempertimbangkan visi, misi, dan kapabilitas kandidat. Dengan demikian, politik identitas masih menjadi fenomena penting dalam demokrasi Indonesia, namun pengaruhnya dapat dikurangi apabila pemilih memiliki literasi politik, rasionalitas, dan kesadaran kritis dalam menilai kandidat¹².

Dalam situasi tersebut, pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menjadi sangat penting untuk dikaji kembali. Keduanya merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap pluralisme, demokrasi, kebebasan beragama, kemanusiaan, dan kehidupan kebangsaan¹³. Nurcholish Madjid dikenal melalui gagasan pembaruan pemikiran Islam, keterbukaan, masyarakat madani, serta pandangan bahwa agama harus menjadi sumber nilai moral dan etika sosial, bukan sekadar simbol politik formal. Pemikiran Nurcholis Madjid penting dalam membaca politik identitas karena ia menekankan substansi nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keterbukaan. Dengan demikian, agama tidak seharusnya dipersempit menjadi alat politik yang memecah masyarakat¹⁴.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. "Mengenal Politik Identitas dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia." October 24, 2025. https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/7915_mengenal-politik-identitas-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi-indonesia.

¹² Rustandi, Hendi. "Politik Identitas di Indonesia: Interaksi Agama, Etnisitas, dan Media Sosial dalam Dinamika Kontestasi Politik." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 5 (2025): 1351–1359. doi:10.54543/syntaximperatif.v6i5.812.

¹³ Nurhidayah, Andika Putra, Dion Pratama Putra, Mursyidatul Fadhliah, and Yassirly Amrona Rosyada. "Moderasi Beragama Perspektif Pluralisme Abdurrahman Wahid (GusDur)." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 360–369. doi:10.15575/jpiu.v2i2.15577.

¹⁴ Ridwan, Z. "Abdurrahman Wahid's Understanding of Humanity and Pluralism in Defending the Indonesian Chinese Community." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2024): 83–98. doi:10.30983/fuaduna.v8i1.8520.

Abdurrahman Wahid juga memiliki kontribusi besar dalam membangun wacana pluralisme di Indonesia¹⁵. Abdurrahman Wahid tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga memperjuangkan hak kelompok minoritas dan kelompok yang mengalami diskriminasi. Pemikirannya menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan sosial-politik, sehingga perbedaan agama, etnis, dan budaya tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan martabat seseorang¹⁶. Penelitian Muhamad Alfian Ardhiansyah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid memandang demokrasi sebagai nilai moral dan spiritual yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa Abdurrahman Wahid menolak politisasi agama, menekankan kebebasan beragama, menghormati hak asasi manusia, dan memandang pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran pluralis.

Abdurrahman Wahid juga memiliki kontribusi besar dalam membangun wacana pluralisme di Indonesia. Abdurrahman Wahid tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga memperjuangkan hak kelompok minoritas dan kelompok yang mengalami diskriminasi. Pemikirannya menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan sosial-politik, sehingga perbedaan agama, etnis, dan budaya tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan martabat seseorang. Penelitian Muhamad Alfian Ardhiansyah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid memandang demokrasi sebagai nilai moral dan spiritual yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa Abdurrahman Wahid menolak politisasi agama, menekankan kebebasan beragama, menghormati hak asasi manusia, dan memandang pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran pluralis¹⁷.

Fenomena penelitian dalam kajian ini terletak pada adanya ketegangan antara nilai pluralisme yang diwariskan oleh para pemikir Islam Indonesia dan

¹⁵ Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

¹⁶ Said, Ridwan Wijayanto. "Fenomena Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2023): 44–51. doi:10.53866/jimi.v3i1.233.

¹⁷ Ardhiansyah, Muhamad Alfian. "Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid terhadap Demokratisasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4, no. 6 (2025): 512–522. doi:10.55681/seikat.v4i6.1838.

menguatnya politik identitas di ruang digital. Di satu sisi, Indonesia memiliki tokoh-tokoh besar seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang meletakkan dasar pemikiran Islam inklusif, demokratis, dan terbuka terhadap keberagaman. Di sisi lain, praktik politik kontemporer menunjukkan bahwa identitas agama dan kelompok masih sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik, terutama melalui media sosial¹⁸. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi ruang dialog dan pendidikan publik justru sering berubah menjadi ruang pertentangan, saling curiga, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan penguatan fanatisme kelompok. Fenomena inilah yang menjadikan kajian tentang pluralisme dan politik identitas menurut Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid pada era digital menjadi relevan dan mendesak¹⁹.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan dasar pemikiran yang mampu menjawab persoalan politik identitas secara lebih mendalam. Kajian tentang politik identitas tidak cukup hanya menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga perlu menawarkan perspektif etis dan intelektual untuk menghadapinya. Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid penting karena keduanya tidak memandang pluralisme sebagai konsep asing, melainkan sebagai bagian dari nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Dengan mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat kajian Islam Indonesia, demokrasi, dan komunikasi politik digital. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi sosial karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan identitas tidak seharusnya dijadikan alat permusuhan, melainkan menjadi dasar untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan beradab.

¹⁸ Safitri, Neng Nurya. "Abdurrahman Wahid's Philosophical Approach to Pluralism: Insights for Social Harmony in Indonesia." *Islamic Thought Review* 2, no. 2 (2024): 129–139. doi:10.30983/itr.v2i2.8790.

¹⁹ Sari, Eva Sofia, and Wely Dozan. "Konsep Pluralisme Pendidikan Islam di Indonesia dalam Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid (Abdurrahman Wahid)." *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 21–39. doi:10.32478/talimuna.v10i2.770.

Penelitian oleh Asripa, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi berjudul “Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid” tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pluralisme menurut Abdurrahman Wahid bertujuan menciptakan harmonisasi masyarakat Indonesia yang majemuk, sedangkan menurut Nurcholish Madjid pluralisme dipahami sebagai nilai positif dan rahmat Tuhan yang memperkaya pertumbuhan budaya manusia²⁰. Penelitian ini memiliki relevansi kuat karena sama-sama membahas pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perbandingan konsep pluralisme kedua tokoh secara umum, belum secara khusus menghubungkannya dengan politik identitas di era digital.

Penelitian oleh Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, dan Irma Indriyani berjudul “Risiko Politik Identitas terhadap Pluralisme di Indonesia” tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa politik identitas dapat mengancam pluralisme karena dapat melunturkan toleransi, memicu kekerasan, memperkuat disintegrasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat yang majemuk²¹. Penelitian ini relevan karena membahas hubungan langsung antara politik identitas dan pluralisme. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menggunakan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai pisau analisis utama, serta belum secara mendalam menempatkan era digital sebagai konteks baru penyebaran politik identitas.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, gap research dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan fenomena politik identitas pada era digital. Penelitian sebelumnya telah membahas pluralisme kedua tokoh, tetapi belum

²⁰ Asripa, Devy Habibi Muhammad, and Ari Susandi. “Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid.” *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2021): 75–90. doi:10.36835/falasifa.v12i02.555.

²¹ Basri, Junaidin, Syakira Ainun Nisa Basri, and Irma Indriyani. “Risiko Politik Identitas terhadap Pluralisme di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 1027–1036. doi:10.35931/aq.v16i3.991.

menempatkannya dalam konteks media sosial, polarisasi digital, dan kontestasi politik kontemporer. Penelitian lain telah membahas risiko politik identitas terhadap pluralisme, tetapi belum menjadikan pemikiran dua tokoh Islam Indonesia tersebut sebagai kerangka konseptual utama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana gagasan pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dapat digunakan untuk memahami, mengkritik, dan merespons politik identitas di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan kajian pemikiran Islam dan politik, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan demokrasi digital yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis dapat melihat bahwa politik identitas di dunia digital saat ini sedang menjadi masalah besar. Banyak pihak yang memanfaatkan isu agama, suku, dan golongan, sehingga hal ini mengancam nilai toleransi dan persatuan bangsa Indonesia. Masyarakat sangat membutuhkan panduan etika yang kuat untuk menghadapi masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari kembali pemikiran tokoh intelektual Muslim Indonesia yang sudah lama membela keberagaman, yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Karena alasan itulah, penelitian ini akan fokus menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang pluralisme dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan?
2. Bagaimana pandangan Abdurrahman Wahid tentang pluralisme dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam memahami serta merespons fenomena politik identitas pada era digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan Nurcholish Madjid tentang pluralisme dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.

2. Untuk menganalisis pandangan Abdurrahman Wahid tentang pluralisme dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
3. Untuk menganalisis relevansi pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam memahami serta merespons fenomena politik identitas pada era digital.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti baik dari segi teori maupun praktik dalam memahami hubungan antara pluralisme dan politik identitas di era digital.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu sosial, politik, keislaman, dan kebangsaan, khususnya mengenai konsep pluralisme dan politik identitas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik tentang pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai dua tokoh Islam Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap keberagaman, demokrasi, toleransi, dan kehidupan sosial-politik masyarakat majemuk. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara pluralisme, politik identitas, dan dinamika masyarakat pada era digital.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberagaman agama, budaya, etnis, dan pilihan politik tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dikelola melalui sikap saling menghargai dan menghormati. Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dapat menjadi landasan moral dan intelektual dalam menghadapi maraknya politik identitas, terutama di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi digital, tidak mudah terprovokasi oleh narasi

kebencian, serta mampu membangun ruang digital yang lebih toleran, demokratis, dan inklusif.

E. Research Problem

Berdasarkan uraian latar belakang, persoalan pokok yang mendasari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara khazanah pemikiran pluralisme yang diwariskan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan realitas politik identitas yang justru semakin menguat di ruang digital. Kedua tokoh tersebut telah meletakkan dasar pemikiran Islam yang inklusif, rasional, humanis, dan terbuka terhadap keberagaman, sehingga secara normatif seharusnya mampu menjadi rujukan etis bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Namun, pada kenyataannya, ruang digital yang berkembang pesat justru sering menjadi arena eksploitasi identitas agama, etnis, dan kelompok untuk kepentingan politik sesaat, sehingga menimbulkan polarisasi, ujaran kebencian, dan pelemahan nilai-nilai toleransi yang selama ini diperjuangkan oleh kedua pemikir tersebut.

Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak karena pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sejauh ini lebih banyak dikaji secara terpisah dan dalam konteks yang bersifat umum, seperti pendidikan multikultural, moderasi beragama, tafsir keagamaan, atau kajian teologis semata. Kedua pemikiran tersebut belum secara khusus diposisikan sebagai kerangka analisis untuk membaca dan merespons fenomena politik identitas yang berkembang melalui media sosial, algoritma ruang gema, disinformasi, maupun polarisasi kontestasi politik kontemporer. Akibatnya, terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan secara langsung antara gagasan pluralisme teologis-rasional Nurcholish Madjid dan gagasan pluralisme humanis-kultural Abdurrahman Wahid dengan tantangan nyata politik identitas pada era digital.

Oleh karena itu, masalah pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, yang masing-masing menekankan dimensi teologis-tauhid dan dimensi humanis-kultural, dapat diposisikan secara bersama sebagai

kerangka konseptual untuk memahami, mengkritik, dan merespons fenomena politik identitas yang berkembang pada era digital. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menautkan pemikiran kedua tokoh secara komparatif dan kontekstual, sehingga tidak hanya menghasilkan pemahaman teoretis mengenai konsep pluralisme, tetapi juga menawarkan landasan etis yang aplikatif bagi upaya membangun ruang digital yang lebih inklusif, toleran, dan demokratis di tengah menguatnya politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam memahami hubungan antara pluralisme, politik identitas, serta pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid pada era digital. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut tampak dalam keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat, serta identitas sosial-politik masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan sosial yang mampu memperkaya kehidupan bersama dan memperkuat persatuan nasional. Nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat demokrasi menjadi dasar penting dalam menjaga keberagaman tersebut agar tidak berubah menjadi sumber konflik²².

Namun, pada era digital, keberagaman identitas tidak selalu hadir sebagai kekuatan pemersatu. Perkembangan media sosial dan ruang publik digital justru sering memperlihatkan munculnya berbagai persoalan sosial-politik, seperti menguatnya politik identitas, polarisasi pandangan keagamaan, penyebaran narasi eksklusif, serta meningkatnya sikap saling curiga antarkelompok. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan, dialog, dan partisipasi demokratis sering kali berubah menjadi ruang

²² Hendi Supriatna, Dadang Kuswana, dan Acep Saprudin. "Promoting Inclusive Islam: The Role of Social Media in Fostering Religious Tolerance in the Digital Era." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22373/jsai.v6i1.5754>.

pertentangan identitas. Dalam konteks tertentu, agama dan identitas kelompok digunakan sebagai alat untuk membangun dukungan politik, menyerang kelompok lain, serta memperkuat batas antara “kami” dan “mereka”.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai pluralisme belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralisme sering kali masih dipahami secara sempit sebagai sikap membiarkan perbedaan, bukan sebagai kesadaran aktif untuk menerima, menghargai, dan memperjuangkan hak setiap kelompok dalam kehidupan bersama. Padahal, dalam masyarakat yang majemuk, pluralisme memiliki peran penting sebagai landasan etis untuk membangun hubungan sosial yang adil, terbuka, dan manusiawi²³. Pluralisme tidak hanya berkaitan dengan toleransi pasif, tetapi juga menuntut adanya pengakuan terhadap martabat kemanusiaan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan.

Dalam penelitian ini, pluralisme dipahami sebagai konsep yang memiliki dimensi teologis, sosial, politik, dan kebangsaan. Secara teologis, pluralisme menunjukkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang harus diterima sebagai kenyataan hidup manusia. Secara sosial, pluralisme menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis antarkelompok. Secara politik, pluralisme berfungsi untuk mencegah dominasi satu identitas terhadap identitas lain. Sementara itu, secara kebangsaan, pluralisme menjadi landasan untuk memperkuat persatuan Indonesia sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman²⁴. Dengan pemahaman tersebut, pluralisme dapat dijadikan sebagai kerangka kritik terhadap politik identitas yang bersifat eksklusif, diskriminatif, dan memecah belah.

²³ Wagianti, Muhamad Adji, Nani Darmayanti, dan Muhammad Rifki Adinur Zein. “Identity Politics in Indonesia: A Computer-Mediated Discourse Analysis of Hate Speech in a Virtual Environment.” *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 8, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i4.1260>.

²⁴ Yudith Yunita dan Muharam Albana. “Politik Identitas dan Polarisasi Demokrasi di Indonesia: Ancaman terhadap Keutuhan Sosial dalam Negara Plural.” *Journal Evidence of Law* 4, no. 2 (2025): 638–645. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1405>.

Pemikiran Nurcholish Madjid menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian ini. Nurcholish Madjid memandang pluralisme sebagai bagian dari ajaran Islam yang bersifat inklusif dan universal. Menurutnya, keberagaman merupakan sunnatullah atau ketetapan Tuhan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perbedaan agama, budaya, dan identitas tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan yang harus diterima dengan sikap terbuka. Dalam pemikiran Nurcholish Madjid, tauhid tidak hanya bermakna pengakuan terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga membebaskan manusia dari sikap absolutisme, fanatisme sempit, dan klaim kebenaran yang meniadakan kelompok lain. Dengan demikian, pluralisme dalam pandangan Nurcholish Madjid memiliki dasar teologis yang kuat untuk menolak eksklusivisme dan dominasi identitas dalam kehidupan sosial-politik²⁵.

Selain Nurcholish Madjid, penelitian ini juga menggunakan pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai dasar analisis. Abdurrahman Wahid memandang pluralisme sebagai praktik sosial dan kultural yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Bagi Abdurrahman Wahid, keberagaman bukan hanya kenyataan sosial, melainkan juga bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pluralisme tidak cukup hanya dipahami sebagai gagasan, tetapi harus diwujudkan melalui pembelaan terhadap kelompok minoritas, perlindungan hak warga negara, penghormatan terhadap kebudayaan lokal, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Pemikiran Abdurrahman Wahid menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar utama dalam membangun kehidupan beragama dan berbangsa. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid menolak politisasi agama yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan dapat merusak hubungan sosial masyarakat.

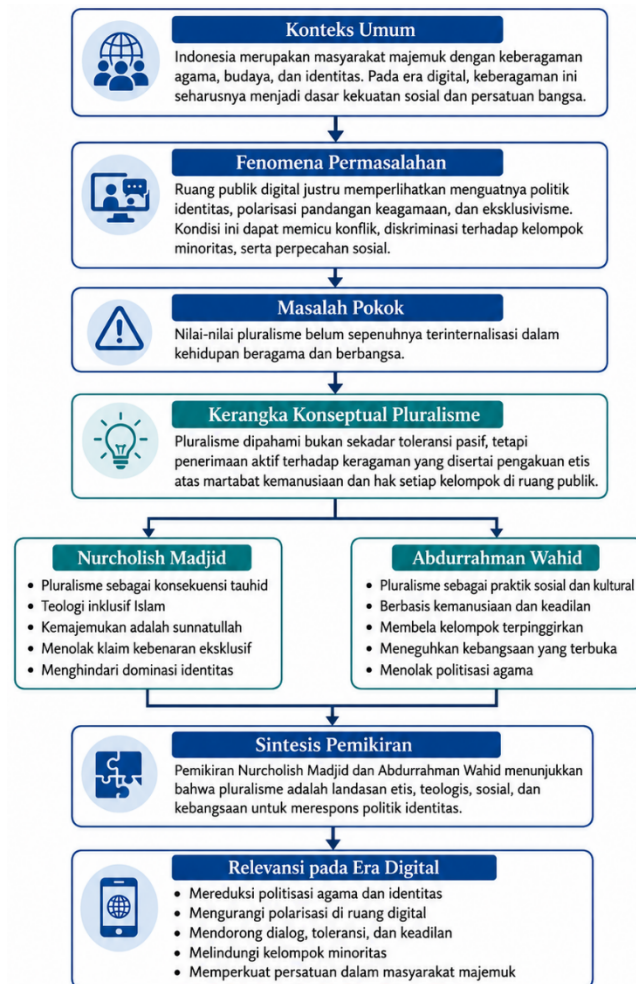
²⁵ Syahrudin Jumriani, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, dan Hikam Ainun Najib. "Analysis of Fairclough's Critical Discourse on Religion Visualization in the Politics of the 2024 Indonesian Presidential Election." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26618/jed.v10i2.17494>.

Berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut, penelitian ini melihat bahwa Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memiliki perhatian yang sama terhadap pentingnya pluralisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keduanya sama-sama menolak sikap keberagamaan yang eksklusif, sempit, dan diskriminatif. Akan tetapi, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Nurcholish Madjid lebih menekankan pluralisme dari aspek teologis, rasional, dan intelektual Islam, sedangkan Abdurrahman Wahid lebih menekankan pluralisme dari aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan praksis kebangsaan. Perbedaan tersebut justru saling melengkapi karena pluralisme tidak hanya membutuhkan dasar pemikiran teologis, tetapi juga membutuhkan tindakan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks era digital, pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menjadi sangat relevan untuk merespons menguatnya politik identitas. Politik identitas yang berkembang di ruang digital sering kali memanfaatkan sentimen agama dan kelompok untuk membangun polarisasi. Narasi keagamaan yang eksklusif, ujaran kebencian, hoaks, dan propaganda identitas dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Kondisi ini dapat melemahkan toleransi, memperkuat prasangka, dan mengancam persatuan masyarakat. Oleh karena itu, pluralisme yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dapat menjadi dasar etis dan konseptual untuk membangun ruang digital yang lebih sehat, inklusif, dan demokratis.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menempatkan pluralisme sebagai konsep utama yang menghubungkan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan fenomena politik identitas pada era digital. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa pluralisme bukan hanya gagasan normatif, tetapi juga kerangka etis, teologis, sosial, dan politik yang dapat digunakan untuk mereduksi politisasi agama, mengurangi polarisasi digital, memperkuat dialog antaridentitas, melindungi kelompok minoritas, serta menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan relevansi

pemikiran kedua tokoh dalam menghadapi tantangan keberagaman pada era digital.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar untuk melihat perkembangan kajian mengenai pluralisme, politik identitas, pemikiran Nurcholish Madjid, pemikiran Abdurrahman Wahid, serta tantangan keberagaman pada era digital. Penelitian terdahulu diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya, sekaligus menemukan celah penelitian yang belum banyak dibahas. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asripa, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi dengan judul “Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid” tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pluralisme menurut Abdurrahman Wahid bertujuan menciptakan harmonisasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Abdurrahman Wahid memandang pluralisme sebagai sikap sosial yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama melalui penghargaan terhadap perbedaan agama, budaya, dan kelompok sosial. Sementara itu, Nurcholish Madjid memahami pluralisme sebagai nilai positif dan rahmat Tuhan yang diberikan kepada manusia agar kehidupan sosial menjadi lebih kaya dan beradab. Penelitian ini relevan karena secara langsung membahas dua tokoh utama yang juga menjadi objek kajian penelitian ini. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada perbandingan gagasan pluralisme secara umum dan belum secara khusus menghubungkannya dengan fenomena politik identitas pada era digital.
2. Penelitian Thoriq Aziz Jayana dan Siswanto dengan judul “Penjabaran Nilai-Nilai Pluralisme Perspektif Nurcholish Madjid dalam Konteks Pendidikan Islam Multikultural” tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme memiliki relevansi besar dalam pendidikan Islam multikultural. Pluralisme dalam pandangan Nurcholis Madjid tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap adanya perbedaan, tetapi juga sebagai nilai

yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan agar peserta didik memiliki sikap terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman. Penelitian ini menegaskan bahwa pluralisme dapat menjadi dasar dalam membangun pendidikan Islam yang tidak eksklusif. Relevansi penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai nilai pluralisme Nurcholish Madjid, tetapi fokusnya masih terbatas pada konteks pendidikan Islam multikultural dan belum membahas politik identitas serta dinamika ruang digital.

3. Penelitian Muhyidin Azmi dengan judul “Interpretasi Nurcholish Madjid atas Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Pluralisme Agama” tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Nurcholish Madjid menafsirkan pluralisme agama dengan dasar ayat-ayat Al-Qur’an yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman, kebebasan beragama, dan kesadaran bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Pemikiran Nurcholis Madjid menunjukkan bahwa Islam memiliki dasar teologis yang kuat untuk menerima pluralitas kehidupan manusia. Penelitian ini penting karena memperlihatkan landasan keagamaan dari gagasan pluralisme Nurcholish Madjid. Akan tetapi, penelitian ini lebih banyak menelaah aspek tafsir dan teologi pluralisme, sehingga belum mengaitkan gagasan tersebut dengan tantangan politik identitas yang berkembang melalui media sosial dan ruang digital.
4. Penelitian Hasan Purnomo Dias, Julhadi, dan Ahmad Hanafi dengan judul “Gagasan Moderasi Beragama: Menguak Pluralisme dalam Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid” tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan pluralisme Nurcholis Madjid berkaitan erat dengan moderasi beragama. Nurcholish Madjid dipandang sebagai tokoh pembaru Islam yang berusaha menampilkan Islam secara inklusif, rasional, terbuka, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini menegaskan bahwa pluralisme Nurcholis Madjid dapat menjadi dasar untuk membangun sikap moderat di tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini relevan karena membahas aktualitas

pemikiran Nurcholish Madjid dalam kehidupan modern. Namun, pembahasannya lebih diarahkan pada moderasi beragama, bukan pada hubungan antara pluralisme dan politik identitas di era digital.

5. Penelitian Ahmad Kurnia, Affy Khoiriyah, dan Didik Himmawan dengan judul “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam” tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme menurut Abdurrahman Wahid tidak hanya berkaitan dengan cara berpikir, tetapi juga cara bertindak. Pluralisme dalam berpikir berarti kesediaan untuk menerima gagasan dari kelompok lain, sedangkan pluralisme dalam bertindak berarti tidak membatasi hubungan sosial hanya karena perbedaan agama, budaya, atau keyakinan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pluralisme Abdurrahman Wahid memiliki implikasi penting bagi pendidikan Islam karena dapat membentuk peserta didik yang inklusif, toleran, dan terbuka. Penelitian ini relevan karena membahas pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid, tetapi fokusnya masih pada pendidikan Islam dan belum membahas pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai kritik terhadap politik identitas digital.
6. Penelitian Ahmad Khoiruddin, Khalilurrahman, dan Benny Prasetya dengan judul “Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Abdurrahman Wahid dan Syafi’i Ma’arif” tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid dan Syafi’i Ma’arif sama-sama menekankan pentingnya pendidikan pluralisme dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif Abdurrahman Wahid, pluralisme harus diwujudkan melalui toleransi, kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, serta kesediaan untuk hidup bersama tanpa menyingkirkan kelompok lain. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan pluralisme bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan nilai. Penelitian ini relevan karena memperkuat pemahaman tentang pluralisme Abdurrahman Wahid, tetapi kajiannya masih berada pada

wilayah pendidikan dan belum secara khusus membahas politik identitas sebagai fenomena sosial-politik pada era digital.

7. Penelitian Muhajirin Ajir, Zulfahmi Alwi, dan Arifuddin Ahmad dengan judul “Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Pluralisme dalam Islam: Kajian Hadis Tematik di Era Kontemporer” tahun 2025. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pluralisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid memiliki dasar keislaman yang kuat dan dapat dipahami melalui nilai-nilai hadis yang menekankan kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid tidak menempatkan pluralisme sebagai gagasan yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai bagian dari nilai Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini relevan karena membahas pluralisme Abdurrahman Wahid dalam konteks kontemporer. Namun, penelitian tersebut masih lebih menekankan kajian hadis dan belum secara khusus mengaitkannya dengan politik identitas, media sosial, dan polarisasi digital.
8. Penelitian Aliya Zulva Ahsani, Fadhil Gilland Rahmatullah, Nabiha Ayu Mardhatillah, dan Moh. Faizin dengan judul “Relevansi Pemikiran Pluralisme Abdurrahman Wahid di Era Digital: Tinjauan Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan” tahun 2025. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid memiliki relevansi dalam membangun etika kewargaan digital. Gagasan Abdurrahman Wahid tentang toleransi, dialog antarbudaya, penolakan terhadap absolutisme, dan penguatan masyarakat sipil dinilai dapat membentuk generasi muda yang mampu menggunakan teknologi digital secara etis, kritis, toleran, dan inklusif. Penelitian ini sangat relevan karena secara langsung menghubungkan pluralisme Abdurrahman Wahid dengan era digital. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada Abdurrahman Wahid dan perspektif pendidikan kewarganegaraan, sehingga belum membandingkannya dengan

pemikiran Nurcholish Madjid serta belum menjadikan politik identitas sebagai fokus utama analisis.

9. Penelitian Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, dan Irma Indriyani dengan judul “Risiko Politik Identitas terhadap Pluralisme di Indonesia” tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas dapat menjadi ancaman serius bagi pluralisme di Indonesia. Politik identitas yang digunakan secara berlebihan berpotensi menimbulkan sikap eksklusif, memperlemah toleransi, memicu konflik sosial, serta mengganggu integrasi bangsa. Penelitian ini relevan karena membahas hubungan langsung antara politik identitas dan pluralisme. Namun, penelitian tersebut belum menggunakan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai kerangka analisis utama, serta belum secara mendalam membahas bagaimana politik identitas berkembang dalam ruang digital.
10. Penelitian Hendi Rustandi dengan judul “Politik Identitas di Indonesia: Interaksi Agama, Etnisitas, dan Media Sosial dalam Dinamika Kontestasi Politik” tahun 2025. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa agama, etnisitas, dan media sosial saling berinteraksi dalam membentuk politik identitas di Indonesia. Media sosial menjadi ruang yang mempercepat penyebaran narasi identitas, memperkuat polarisasi, memengaruhi preferensi elektoral, dan membentuk opini politik masyarakat. Penelitian ini relevan karena membahas politik identitas dalam konteks demokrasi digital. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menggunakan pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai dasar kritik terhadap politik identitas di era digital.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat ditemukan bahwa sebagian penelitian telah membahas pluralisme dalam pemikiran Nurcholish Madjid, sebagian lainnya membahas pluralisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, dan beberapa penelitian telah membahas politik identitas dalam konteks pluralisme maupun media sosial. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung terpisah. Kajian tentang Nurcholish

Madjid umumnya lebih menekankan aspek teologi, tafsir, moderasi beragama, dan pendidikan multikultural. Kajian tentang Abdurrahman Wahid lebih banyak membahas pendidikan pluralisme, toleransi, dan kemanusiaan. Sementara itu, kajian tentang politik identitas lebih banyak diarahkan pada dampaknya terhadap demokrasi, pluralisme, dan media sosial, tanpa menjadikan pemikiran kedua tokoh tersebut sebagai kerangka analisis utama.

Dengan demikian, gap research dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menghubungkan pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dengan fenomena politik identitas pada era digital. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas pluralisme kedua tokoh secara konseptual, tetapi juga menempatkannya sebagai kerangka kritik untuk memahami dan merespons politik identitas yang berkembang melalui media sosial, polarisasi digital, dan kontestasi politik kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menggabungkan tiga aspek utama, yaitu pemikiran pluralisme Nurcholish Madjid, pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid, dan fenomena politik identitas pada era digital.

